

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Jepara

Halaman 13

Disiapkan Rp 4 M untuk 11 Kelurahan

JEPARA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara dan kelurahan diminta untuk bersiap diri menerima kucuran anggaran dari pemerintah pusat seperti halnya Dana Desa (DD). Hal ini terungkap dalam Sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa, pada Kamis (8/11), di Sekuro Village Resort Jepara.

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Ahmad Marzuqi, Sekda Jepara Sholih, Anggota Komisi V BPK RI Isma Yatun dan Anggota Komisi XI DPR, Fathan Subchi.

Anggota Komisi XI, Fathan Subchi menyatakan, Pemerintah Indonesia menyediakan dana sebesar kurang lebih Rp 3 Triliun pada

tahun 2019 mendatang. Dana tersebut akan disalurkan untuk sekitar 8.122 kelurahan di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Jepara.

Khusus di Kabupaten Jepara, ada dana sekitar Rp 4 Miliar yang akan dibagi untuk 11 kelurahan di Jepara.

Disampaikan juga, dalam sidang Interna-

tional Monetary Found (IMF)- World Bank (WB), di Pulau Bali beberapa waktu lalu, program dana desa yang sudah dilakukan, mendapatkan apresiasi. Program ini dinilai sebagai salah satu cara mengurangi angka kemiskinan. Termasuk menghilangkan jarak antara desa dan kota. Apalagisaat ini, tingkat

penyimpangan semakin kecil. Karena banyaknya lembaga pengawas yang terlibat dalam pengawasan dana desa ini. Seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Kepolisian termasuk Departemen Dalam Negeri.

"Ada sekitar tujuh hingga delapan institusi yang terlibat dalam pengawasan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga penyimpangan semakin turun. Keberhasilan ini akhirnya berlanjut untuk wilayah kelurahan," tuturnya.

Namun, jumlah besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk kelurahan akan berbeda dibandingkan dana desa.

Perbedaan ini karena cakupan luasnya wilayah kelurahan lebih kecil dibandingkan luas wilayah desa. Rencana strategis pemerintah untuk mengalokasikan dana kelurahan ini, tentunya memperhatikan kondisi riil di lapangan terhadap pengembangan kelurahan. Alokasi dana kelurahan dinilai perlu untuk menunjang pemerataan pembangunan di pemerintahan kota. Apalagi, saat ini ada sejumlah kelurahan yang

memang minim anggarannya.

Harus Akuntabel

Sementara itu Anggota V BPK RI, Isma Yatun, mengatakan, sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap desa diberikan kewenangan mengelola keuangan desa. Untuk itu, keuangan desa harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Dikatakan, salah satu permasalahan pengelolaan keuangan desa, diantaranya yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem komunikasi dan

informasi pada pemerintah desa belum sepenuhnya memadai.

"Pengawasan belum mampu meminimalkan penyimpangan/kesalahan pengelolaan keuangan desa," ujarnya.

Sedangkan Bupati Ahmad Marzuqi mengatakan, pelaksanaan DD (Dana Desa) untuk 184 Desa di Jepara selama empat tahun, selalu mengalami peningkatan. Mulai dari Rp55,54 Miliar pada 2015, meningkat menjadi Rp124,69 Miliar pada tahun 2016. Lalu pada 2017 meningkat menjadi Rp158,76 Miliar dan Rp190,27 Miliar pada tahun 2018. ■ *Dis-Tj*